

Menunggu Aksi Kebijakan Industri Prioritas

Oleh: Mudrajad Kuncoro*

Rabu, 02/01/2008



Sumber: <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/1id37217.html>

Harus diakui, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla ketidakstabilan makroekonomi dan ketidakpastian kebijakan ekonomi makro jauh menurun dibandingkan dengan masa lalu. Angka-angka indikator makroekonomi pun boleh dikata berada dalam kondisi "aman dan terkendali."

Namun, banyak industri masih terseok-seok, dengan laju pertumbuhan yang rendah, daya saing yang rendah, dan pangsa pasar yang menurun. Selama 2005-2007, rata-rata per tahun pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7%, inflasi 10%, bunga SBI 9,9%, dan kurs Rp9.343/US\$.

Pasar modal pun diwarnai oleh rekor-rekor baru indeks harga saham gabungan (IHSG) dan surat utang negara (SUN), yang terus diminati investor domestik dan pemodal asing. Obligasi Republik Indonesia (ORI) selalu terserap oleh investor perseorangan dengan nilai yang melebihi target.

Cadangan devisa pun melonjak secara signifikan, dari posisi US\$34,7 miliar pada akhir 2006 menjadi US\$55,1 miliar pada 7 Desember 2007.

Bagaimana dengan sektor industri? Pada 1970-an hingga sekarang, peranan sektor industri meningkat pesat meninggalkan sektor pertanian yang kontribusinya semakin menurun. Hingga akhir 2007, peranan sektor industri manufaktur mencapai 28% dari PDB.

Pertumbuhan sektor industri manufaktur hanya meningkat dengan laju satu digit, di bawah 10%, sejak 1997. Padahal, sebelum krisis pada 1997/1998, sektor industri manufaktur dapat tumbuh dua digit. Selama 2004-2007, industri hanya tumbuh sekitar 4,6%-6,4%.

Patut dicatat, ada dua industri yang mengalami masa bonanza selama pemerintahan Yudhoyono-Kalla. Industri alat angkut-mesin-peralatan menjadi cabang industri dengan laju pertumbuhan tertinggi sebesar 31,2%. Industri pupuk-kimia-barang dari karet menjadi cabang industri dengan laju pertumbuhan tertinggi kedua, sebesar 20,2%.

Selama tiga tahun terakhir ini, kedua industri ini ternyata boleh dikata merupakan sunrise industry. Indikatornya sederhana, yaitu pangasanya melebihi rata-rata per subsektor industri dan memiliki pertumbuhan di atas rata-rata industri.

Industri pupuk banyak diuntungkan dengan naiknya harga minyak mentah dunia, terutama dari produk amoniak. Industri kimia menimbulkan dampak multiplier bagi sektor hilirnya. Hal ini setidaknya terlihat dari menjamurnya jumlah apotek di Indonesia.

Industri barang dari karet merupakan industri hulu untuk industri mobil dan sepeda motor, yang mengalami lonjakan pertumbuhan pada 2007.

Industri alat angkut terkait dengan maraknya industri penerbangan dan otomotif, yang terkerek menyusul mulai pulihnya daya beli konsumen. Subsektor komunikasi dan transportasi udara memang menjadi primadona, karena selama lima tahun terakhir ini masing-masing tumbuh di atas 20% dan 10%.

Di sisi lain, ada beberapa cabang industri yang malah tergolong sunset. Artinya, peran industri ini kecil dalam industri manufaktur dan memiliki pertumbuhan di bawah rata-rata industri selama tiga tahun terakhir ini.

Industri yang termasuk sunset adalah industri semen dan barang galian nonlogam, industri barang lainnya, industri kertas dan barang cetakan, serta industri barang kayu dan hasil hutan. Daftar industri yang sunset bisa bertambah apabila kita memasukkan industri yang gulung tikar dan tutup akibat bencana alam di berbagai daerah.

Di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, misalnya, gempa tektonik yang terjadi pada Mei 2006 mengakibatkan hancurnya sentra industri dan lunturnya ikon daerah itu. Kerusakan paling parah di DI Yogyakarta dialami oleh pusat kerajinan gerabah di Kasongan dan Pundong, kerajinan kulit Manding, dan kerajinan perak Kotagede.

Di Klaten, daerah yang terkena dampak langsung gempa justru adalah sentra UKM, terutama konveksi, batik, gerabah, logam, dan mebel. Dampak gempa tidak hanya dirasakan oleh UKM di DI Yogyakarta dan Klaten, tetapi juga para pemasok bahan baku dan pasar utama produk UKM.

Omset industri batik di Pekalongan terancam menurun karena mereka menjual sarung dan batik sekitar 20%-30% ke DI Yogyakarta. Pariwisata di Bali pun khawatir, karena selama ini 50%-70% produk kerajinan yang dipasarkan di Pulau Dewata itu berasal dari Yogyakarta.

Pemasok kayu pule di Jawa Timur dan Sumatra Selatan, yang selama ini menopang bahan baku kayu untuk para perajin topeng di Gunung Kidul dan Bantul, terancam kehilangan pasar utamanya.

Industri manufaktur Indonesia memainkan peranan penting sejak kita menyadari tidak bisa mengandalkan ekspor sektor migas. Ekspor industri manufaktur menyumbang sekitar 85% ekspor nonmigas dan sekitar 67% dari total ekspor Indonesia selama ini. Kontribusi ekspor industri ini bahkan telah melampaui ekspor sektor pertanian dan migas sejak awal dasawarsa 1990-an.

Dalam konteks inilah, reformasi sektor industri masih "jalan di tempat." Hal ini

karena sektor ini menghadapi masalah deindustrialisasi berupa menurunnya jumlah perusahaan dan penciptaan lapangan kerja.

Belajar dari Jepang

Kita mungkin perlu belajar dari pengalaman Jepang dalam menata industri dan meningkatkan daya saing. Mekanisme pemerintah Jepang mengarahkan perkembangan ekonomi, yang disebut *gyosei shido*, merupakan semacam panduan kebijakan yang mencakup insentif perdagangan, pasar tenaga kerja, persaingan, dan perpajakan.

Di bidang industri, ada setidaknya tiga elemen kebijakan. Pertama, mengembangkan sektor manufaktur yang memiliki daya saing tinggi.

Kedua, restrukturisasi industri secara terencana menuju industri yang memiliki produktivitas dan nilai tambah tinggi. Ketiga, strategi bisnis internasional dan domestik yang agresif.

Dalam konteks inilah sektor riil agaknya membutuhkan reformasi yang mendasar. Mungkin berupa paket kebijakan yang lebih menyeluruh dari Inpres No. 6/2007, berupa:

Pertama, pemerintah perlu menetapkan roadmap kebijakan industri nasional sampai 2009, jangka menengah, hingga 2030, dengan sasaran dan strategi yang rinci.

Kedua, setelah roadmap kebijakan ditetapkan, perlu ditekankan pentingnya implementasi dan efektivitas pemantauan dari kebijakan.

Ketiga, insentif perlu diberikan kepada industri yang merupakan "prioritas nasional" dan berbasis "kompetensi inti daerah", baik berupa fasilitas pajak dan kawasan khusus maupun kemudahan perizinan.

Keeempat, perlu rencana aksi yang jelas bagaimana mengembangkan industri komponen lokal, industri hilir di bidang agribisnis, dan industri rakyat yang hancur akibat bencana di berbagai daerah.

Dengan sisa waktu sekitar dua tahun, mampukah Presiden Yudhoyono-Wapres Kalla beserta Kabinet Indonesia Bersatu melakukan perubahan mendasar? Menggerakkan sektor riil, khususnya industri manufaktur, perlu menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Sudah saatnya Presiden dan Wapres berhenti menebar pesona, beralih menjadi menebar aksi. Semoga perubahan yang dijanjikan tidak sekadar mitos.

* Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM/Anggota Tim Ahli Kadin & Tim Pemantau Inpres No. 6/2007.